

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Haluan Politik luar negeri Amerika Serikat tidak lepas dari perhatian pentingnya melindungi warga negara, teritorial, ekonomi, dan perlindungan negara sekutu. Kebijakan ini sejalan dengan kepentingan nasional yang ingin dicapainya. Politik luar negeri Amerika mengalami dinamika perubahan yang dipengaruhi oleh perkembangan situasi domestik maupun internasional. Politik luar negeri Amerika Serikat yang dinamis menyesuaikan kepentingan nasional dan konteks internasional yang sedang dihadapi. Kebijakan atau Politik luar negeri pada dasarnya merupakan keseluruhan sikap dan aktivitas sebuah negara untuk menanggulangi masalah sekaligus memetik keuntungan dari lingkungan internasionalnya. Dengan demikian, politik luar negeri sesungguhnya merupakan hasil dari interaksi lingkungan domestik dan lingkungan eksternalnya. Namun demikian, politik luar negeri suatu negara pasti ditujukan untuk mencapai kepentingan nasionalnya.

Amerika Serikat dan Iran resmi memulai hubungan kenegaraan pada akhir tahun 1800 ketika Raja Nasser Al-Din Shah mengirim duta besarnya ke Washington. Demi menyelamatkan keuangan kerajaan Iran yang mengalami krisis, Amerika juga pada tahun 1911 mengirim Morgan Shuster, seorang Bankir Niaga Amerika ke Iran, dan seorang penasihat ekonomi Arthur Chester Millspaugh, memimpin keuangan kerajaan di Iran. Di bawah tangan Shuster dan Millspaugh keuangan Iran berkembang pesat, ekonomi Iran mulai terbangun dan Iran mulai menjalin hubungan perdagangan dengan Barat. Sejak saat itu hingga pecah Perang Dunia II, Hubungan kedua Negara tetap terjalin dengan baik. Undang-Undang yang berlaku di Iran banyak dibuat berdasarkan kesepakatan dari Amerika Serikat (Mikail, 2018).

Iran memposisikan Amerika Serikat sebagai “kekuatan ketiga” dalam perjuangan membebaskan diri dari dominasi

Inggris dan Rusia. Amerika Serikat bersama Pemerintahan Muhammad Reza Shah Pahlevi telah membawa kebangkitan perekonomian Iran karena dukungan dana yang besar dari Amerika dan sikap Reza Shah yang sangat pro-Israel. Bahkan Reza Shah sempat menjadi Kaisar minyak dunia banyak melakukan infestasi di luar negeri. Reza Shah bahkan berambisi ingin menjadikan Iran sejajar dengan Britania Inggris dan Amerika Serikat. Di Rezim ini pula Amerika bersama sekutunya mendukung program pengayaan nuklir Iran, dengan tujuan tenaga listrik Iran tercukupi dan minyak bisa tereksplorasi lebih besar. Amerika menandatangani kesepakatan perjanjian memasok uranium selama 10 tahun dengan Iran.

Kebijakan Nuklir Iran dalam beberapa tahun terakhir adalah salah satu pemicu tekanan Barat melalui Amerika Serikat dan sekutunya terhadap Republik Islam tersebut. Mereka menilai bahwa tujuan Iran untuk mengadakan pengayaan uranium tidak lain adalah demi kepentingan militernya agar mampu hadir sebagai kekuatan dominan di Kawasan Timur Tengah dalam menandingi salah satu sekutu terdekat Amerika Serikat dan Israel. Iran sendiri secara resmi berulang kali menyatakan sanggahannya terhadap tuduhan itu dan mengatakan bahwa program pengayaan uranium mereka betul-betul demi tujuan damai seperti membangun pembangkit listrik tenaga nuklir untuk membantu memenuhi kebutuhan energi nasionalnya di masa depan. Kemudian pada tahun 2006 AS menyatakan bersedia bergabung dalam pembicaraan nuklir multilateral dengan Iran jika negara itu terbukti menghentikan pengayaan nuklir.

Pada Desember 2007 Sebuah lembaga AS yaitu National Intelligence Estimate mengungkap dengan yakin bahwa Iran mengembangkan senjata nuklir hingga musim gugur 2003. Selanjutnya di tahun 2008 Presiden AS George W Bush untuk pertama kalinya mengirim seorang pejabat, Wakil Menteri Luar Negeri Bill Burns, untuk ambil bagian dalam negosiasi nuklir dengan Iran di Jenewa, Swiss. Sementara itu Inggris, Prancis, dan AS mengumumkan Iran sedang

membangun situs pengayaan uranium rahasia di Fordow, dekat kota suci muslim, Qom (Michico, 2018).

Tahun 2013 AS dan pejabat Iran memulai pembicaraan rahasia yang intensif terkait masalah nuklir. Kemudian pada 28 September 2013, Obama dan Rouhani berbicara melalui telepon. Itu merupakan hubungan pejabat tertinggi antara kedua negara dalam 30 tahun terakhir. Pada 23 November, berdasarkan perundingan rahasia, Iran dan enam negara kekuatan besar mencapai pakta sementara yang disebut Joint Plan of Action (JPOA). Isinya Iran setuju menekan pengembangan nuklirnya dengan imbalan keringanan sanksi. Keenam negara itu adalah AS, Inggris, China, Prancis, Jerman, dan Rusia. Pada 14 Juli 2015, kesepakatan diteken, di mana Iran setuju mengambil langkah tegas antara lain memangkas jumlah bahan baku nuklir dan melumpuhkan bagian kunci dari reaktor nuklir di Arak, sebagai imbalan atas keringanan sanksi signifikan dari AS, PBB, dan Uni Eropa. Kesepakatan itu disebut Joint Comprehensive Plan of Action atau Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA) (Michico, 2018).

JCPOA adalah kesepakatan yang dijalin antara 5 negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB (AS, Inggris, Perancis, Rusia, China) dan Uni Eropa yang diwakili oleh Jerman (selanjutnya disingkat P5+1). Kesepakatan ini berisikan kesediaan Iran untuk membatasi aktivitas nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi ekonomi. Pada 18 April 2017 Trump menandatangani JCPOA yang berlaku untuk tiga bulan. Ketika pertama kali menghadapi kesepakatan nuklir Iran, pemerintah Trump menyatakan Iran mematuhi janjinya. 17 Juli Trump menandatangani JCPOA selama tiga bulan. *The New York Times* melaporkan, Trump dengan berat hati menyatakan Iran mematuhi kesepakatan. Dia mengindahkan nasihat dari sebagian besar penasihatnya.

Pada 11 Januari 2018 Trump memperpanjang JCPOA selama 120 hari untuk terakhir kalinya. Pemerintahan Trump menahan sanksi keras terhadap Iran untuk memberikan kesempatan kepada Uni Eropa dan Kongres AS memenuhi tuntutanannya. Selanjutnya 16 Maret negara-negara Uni Eropa

mempertimbangkan sanksi baru terhadap Iran untuk mempertahankan AS dalam kesepakatan nuklir Iran. Reuters melaporkan, Inggris, Prancis, dan Jerman menyusun dokumen yang mengusulkan sanksi terhadap program rudal balistik Iran. Rudal balistik bukan bagian dari perjanjian nuklir, namun pemerintahan Trump menyatakan rudal ini digunakan untuk mendestabilisasi kawasan, Yaman dan khususnya Suriah. Prancis secara khusus berusaha melobi dan menenangkan pemerintahan Trump. Namun, pada 4 Mei Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan, tuntutan AS untuk mengubah kesepakatan itu tidak dapat diterima.

Tepat pada tanggal 8 Mei 2018, Presiden AS, Donald Trump, menyatakan bahwa AS secara resmi keluar dari kesepakatan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Trump mengklaim bahwa JCPOA adalah “kesepakatan sepihak yang seharusnya tidak pernah dibuat” dan menegaskan akan kembali menetapkan sanksi untuk Iran (Mikail, 2018). Pada 14 Juli 2015, JCPOA ditandatangani di Wina. Namun, hanya bertahan 3 tahun, AS menarik diri dari kesepakatan ini meskipun Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) telah menilai bahwa Iran sudah memenuhi kewajibannya sesuai yang diminta JCPOA. Menurut Trump, kesepakatan itu masih kurang lengkap karena tidak membahas masalah rudal balistik, aktivitas nuklir Iran pasca 2025, dan peran Iran di Suriah (Asmardika, 2018).

Keputusan Trump untuk mengingkari kesepakatan yang diinisiasi oleh mantan Presiden Amerika Serikat ke-44, Barack Obama, itu mendatangkan kecaman dari banyak pihak, terutama Uni Eropa, akibat terancamnya investasi mereka di Iran. Selain itu, muncul kekhawatiran bahwa sikap AS ini akan berdampak pada peningkatan ketegangan di Timur Tengah, serta, yang lebih penting, akan mengganggu pasokan minyak global. Ketidakpastian suplai minyak global akibat tindakan sepihak Trump sempat membuat bursa saham Wall Street mengalami ketidakpastian meski menurut Brian Battle, Direktur di Trading Performance Trust Capital Partner, peluang untuk membicarakan negosiasi terkait nuklir Iran

masih terbuka dan langkah AS tidak akan sekeras yang diucapkan Trump (Stars, 2018).

Berdasarkan uraian di atas penulis mengajukan judul skripsi sebagai berikut: “Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Keluar dari Perjanjian Nuklir Iran pada Tahun 2015-2018”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah, sebagai berikut: Mengapa AS Keluar dari perjanjian nuklir JCPOA?

C. Kerangka Berpikir

Dalam hal ini, teori maupun konsep sangat membantu dalam menjelaskan masalah-masalah yang terjadi di atas. Konsep adalah abstraksi yang merepresentasikan sebuah objek, karakter sebuah objek, atau fenomena tertentu. Salah satu fungsi dari konsep adalah mensistematisasikan ide-ide, persepsi-persepsi, dan simbol-simbol dalam bentuk klasifikasi dan generalisasi. Untuk menjelaskan bagaimana Kebijakan Politik Amerika Serikat keluar dari perjanjian nuklir Iran, Penulis memilih untuk menggunakan konsep kebijakan luar negeri. Dipilih pendekatan ini karena menurut penulis memiliki relevansi dan dapat menjembatani dalam menjawab rumusan masalah di atas.

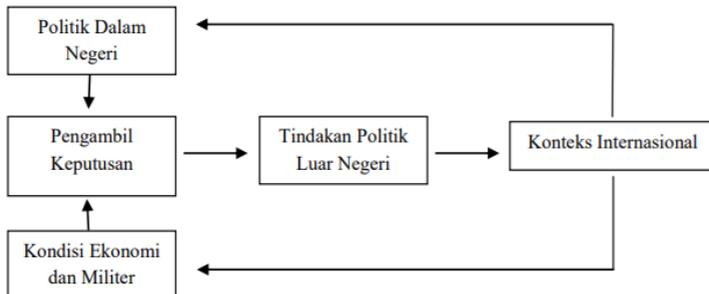
Menurut Coplin, sifat keputusan luar negeri ada tiga, keputusan luar negeri yang bersifat umum, administratif dan keputusan-keputusan yang bersifat krisis. Kebijakan keputusan luar negeri yang bersifat umum terdiri dari serangkaian keputusan yang diekspresikan melalui pernyataan dan tindakan langsung. Seringnya, politik luar negeri ini menyangkut pernyataan-pernyataan yang umum serta rencana yang bersifat menjaga kemungkinan. Selanjutnya, keputusan yang bersifat administratif adalah keputusan administratif yang mempengaruhi kebijakan luar negeri yang dibuat oleh anggota birokrasi yang memang bertugas melaksanakan hubungan luar negeri negaranya. Sedangkan keputusan-keputusan yang bersifat krisis merupakan kombinasi dari keduanya. Keputusan ini

mampu memberikan dampak kepada kebijakan umum suatu negara serta dapat memperkuat kebijakan yang telah ada. Lebih spesifik lagi, keputusan krisis biasanya terbatas pada beberapa negara yang terlibat secara langsung dan biasanya terbatas pada tindakan mendesak yang harus direspon oleh para pembuat keputusan (Coplin, 1992).

Politik luar negeri Amerika Serikat telah mengalami berbagai perubahan dinamika. Hal tersebut merupakan bentuk penyesuaian strategi Amerika Serikat untuk mencapai kepentingan nasional mereka. Seperti halnya negara-negara lain tindakan politik luar negeri Amerika Serikat bertujuan untuk memenuhi kepentingan nasional. Sehingga dalam beberapa abad lamanya, negara ini melakukan sejumlah perubahan karakteristik atau prinsip kebijakan luar negerinya dalam menghadapi konstelasi politik internasional. Faktor domestik dan internasional erat kaitannya dengan alasan suatu negara melakukan perubahan pola kebijakan.

Dalam penulisan riset ini, penulis menggunakan teori politik luar negeri yang dipaparkan oleh William Coplin. Penetapan politik luar negeri oleh pengambil kebijakan di suatu negara menurut Coplin dipengaruhi oleh empat determinan yang meliputi konteks internasional, kondisi ekonomi dan militer, politik dalam negeri, serta perilaku pengambil kebijakan (Coplin W. , 1990). Konteks internasional menurut Coplin ialah posisi khusus negara dalam hubungannya dengan negara lain. Sedangkan kondisi ekonomi dan militer serta politik domestik merupakan determinan yang secara langsung mempengaruhi perilaku pengambil keputusan dalam menetapkan politik luar negeri. Hubungan keempat determinan tersebut dalam penetapan politik luar negeri dapat dilihat pada bagan berikut.

Bagan 1: Proses Penetapan Politik Luar Negeri Menurut William Coplin



Berdasarkan bagan diatas dapat dilihat bahwa determinan konteks internasional, politik dalam negeri, serta kondisi ekonomi dan militer berpengaruh terhadap perilaku pengambil keputusan dalam menentukan tindakan politik luar negeri negara yang dipimpinya. Selain dipengaruhi oleh pertimbangannya akan ketiga determinan tersebut, perilaku pengambil keputusan juga dipengaruhi oleh persepsi dan pemikirannya. Oleh karena penjelasan tentang determinan perilaku pengambil kebijakan kurang begitu dijelaskan oleh Coplin, maka dalam penelitian ini penulis juga memakai teori politik luar negeri yang dirumuskan oleh Richard Snyder yang berfokus pada perilaku pengambil kebijakan sebagai faktor yang melatarbelakangi tindakan politik luar negeri suatu negara.

Oleh karena itu kita perlu untuk menggaris bawahi bahwa setiap konsideran hanya mempengaruhi secara parsial, sehingga setiap konsideran bukanlah faktor tunggal terhadap terbentuknya suatu kebijakan luar negeri.

1. Politik Dalam Negeri

Politik domestik membawa dampak besar terhadap politik luar negeri suatu negara. Perbedaan sistem pemerintahan yang dianut seperti demokratis atau autokrasi, terbuka atau tertutup merupakan keadaan dalam negeri yang dipertimbangkan dalam membuat keputusan. Kemudian stabilitas negara serta kondisi dalam negeri menjadi bahan pertimbangan dalam

mengambil keputusan. Namun perlu diingat bahwa politik dalam negeri hanyalah seperangkat konsideran yang bekerja dalam perumusan politik luar negeri sebuah negara.

Coplin memfokuskan analisisnya pada hubungan antar para pengambil keputusan politik luar negeri dengan aktor-aktor dalam negeri, yang berupaya mempengaruhi perilaku politik luar negeri mereka. Coplin memberikan istilah *policy influencers* bagi yang mempengaruhi kebijakan atau pengambil keputusan. Pengambil keputusan menentukan kepentingan nasional, mengatur strategi dan membuat kebijakan atau mengevaluasi kebijakan yang sudah dilaksanakan, Mengevaluasi kebijakan yang sudah dilaksanakan.

Selanjutnya, Coplin mengategorikan *policy influencers* menjadi empat katagori yaitu, *bureaucratic influencer*, *partisan influencer*, *interest influencer*, dan *mass influencer* (Coplin, 1992).

Bureaucratic influencer adalah berbagai individu serta organisasi di dalam lembaga eksekutif pemerintah yang membantu para pengambil keputusan dalam menyusun serta melaksanakan kebijakan. Kemudian kelompok-kelompok birokratis menjadi sangat berpengaruh apabila mereka merupakan anggota dari pengambil keputusan.

Tipe yang kedua adalah *partisan influencer*, mereka bertujuan menerjemahkan tuntutan-tuntutan masyarakat menjadi tuntutan politis, yaitu tuntutan-tuntutan kepada para pengambil keputusan yang menyangkut kebijakan-kebijakan pemerintah

Tipe yang ketiga adalah *interest influencers*, terdiri atas sekelompok orang yang bergabung bersama melalui serangkaian kepentingan yang sama, yang belum cukup luas untuk bisa menjadi dasar bagi aktivitas kelompok partai, namun sangat dibutuhkan untuk menyerahkan sumber-sumber untuk mendapat dukungan dari pengambil keputusan yang lain.

Terakhir adalah *mass influencers*, dalam hal ini mengacu pada iklim opini, yang dimiliki oleh populasi yang dipertimbangkan oleh para pengambil keputusan pada saat menyusun politik luar negeri. Dampak *mass influencers* bisa beraneka ragam tergantung kepada sistem politik yang dianut suatu negara.

Dalam kasus perundingan nuklir yang terjadi antara Amerika dan Iran, pembatalan perjanjian terjadi dimasa kepemimpinan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Amerika menilai isi perjanjian hanya membatasi aktivitas pengembangan nuklir dimasa tertentu saja, bukan penghentian pengembangan rudal balistik.

Pemilu yang dimenangkan oleh kandidat presiden dari Partai Republik, Donald Trump. Kebijakan Donald Trump terhadap Iran kurang lebih sejalan dengan kebijakan yang pernah diberlakukan oleh George W. Bush dikarenakan keduanya berasal dari partai dan basis pendukung yang sama yaitu dari partai Republik. Presiden AS, Donald Trump, menarik AS keluar dari JCPOA. Trump telah berjanji kepada PM Israel, Netanyahu bahwa ia tidak akan membiarkan Iran memiliki senjata nuklir. Kepentingan nasional AS di Timur Tengah selalu paralel dengan kepentingan nasional Israel.

2. Kondisi Ekonomi dan Militer

Pengambil keputusan harus mempertimbangkan kondisi ekonomi dan militer dalam membuat kebijakan luar negeri mereka. Pengambil keputusan harus mempertimbangkan kekuatan ekonomi dan militer, serta kelemahan negaranya ketika ia menyusun politik luar negeri. Pengambil keputusan harus menyeimbangkan komitmen dan kemampuannya dengan memahami keterbatasan-keterbatasannya, yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi dan militer (Coplin, 1992).

Ekonomi dan militer merupakan kekuatan dalam negeri sebuah negara. Untuk menentukan suatu negara

dapat dikatakan kuat dapat dilihat dari GNP, GNP per kapita dan neraca pembayaran suatu Negara menentukan hal tersebut. Untuk menentukan kuat dan lemahnya militer suatu negara dapat dilihat dari kapasitas penggunaan kekuatan militer negara tersebut, tingkat ketergantungan kepada negara lain serta kestabilan dalam negeri suatu negara.

Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump teruscatat kinerja yang kuat. Bahkan pada kuartal II 2018, ekonomi AS menghasilkan kinerja terbaik setelah hampir empat tahun. Hal ini disebabkan ekspor yang meningkat dan impor yang menurun. Amerika Serikat merupakan negara yang memiliki tingkat kekuatan militer, ekonomi, dan politik serta teknologi yang tinggi.

3. Konteks Internasional

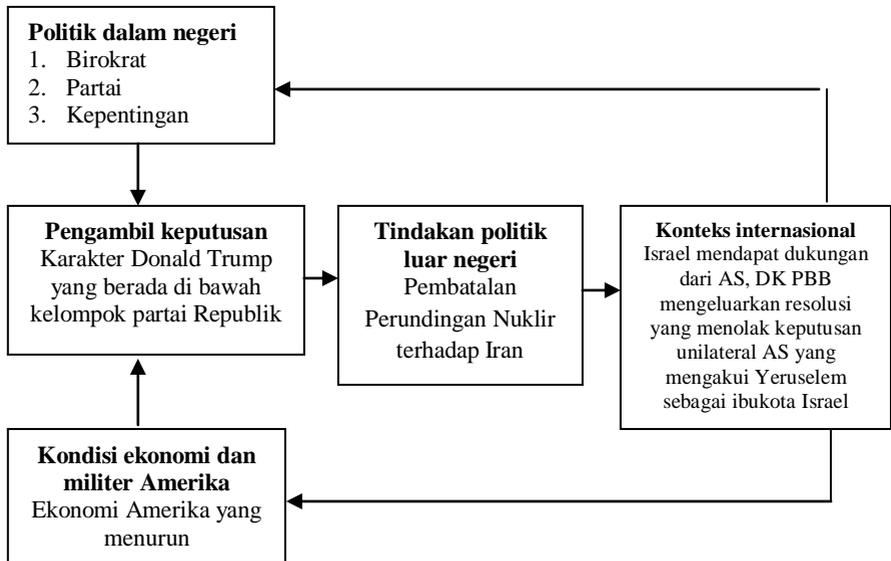
Konteks internasional merupakan aspek penting dalam membuat keputusan, terlebih menyangkut hubungan dengan negara lain. Coplin menyebutkan bahwa konteks internasional dapat merubah dan mempengaruhi kebijakan suatu negara, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Coplin menyatakan ada tiga elemen penting dalam membahas dampak konteks internasional terhadap politik luar negeri suatu negara, yaitu geografis, ekonomis dan politis. Lingkungan internasional setiap negara terdiri atas lokasi yang didudukinya, dalam kaitannya dengan negara-negara lain dalam sistem itu dan juga hubungan-hubungan ekonomi dan politik antara negara-negara itu dengan negara-negara lain.

Pasca Perang Dingin, AS muncul sebagai poros utama kekuatan dunia. Imbasnya, dalam berbagai dinamika global dunia mulai tahun 1991 (setelah keruntuhan Uni Soviet), AS berhasil mengintervensi kebijakan negara-negara lain, terutama negara-negara yang sedang berkembang, termasuk negara yang

terletak Timur Tengah. Invasi militer AS di Irak, Afghanistan, Libya dan beberapa negara berkembang lainnya, menunjukkan ambisi AS untuk mendominasi dunia, khususnya di Timur Tengah.

Gambar 2. Interaksi antar Faktor dalam proses pembuatan Keputusan Politik Luar Negeri



D. Hipotesa Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan kerangka teori diatas maka penulis menyimpulkan alasan Amerika Serikat keluar dari perundingan nuklir dengan Iran di tahun 2018 adalah karena dipengaruhi oleh:

1. Faktor politik domestik, yaitu Presiden Amerika Serikat Donald Trump didukung oleh Partai Politik Republik yang karakteristiknya percaya pada pertahanan nasional yang kuat dan menyokong alokasi dana besar untuk militer.
2. Faktor ekonomi dan militer yaitu perekonomian Amerika Serikat menurun saat dilakukannya perjanjian nuklir Iran karena militer Amerika

tersaingi negara lain, sedangkan Amerika Serikat merupakan negara yang memiliki tingkat kekuatan militer, ekonomi, dan politik serta teknologi yang tinggi, Amerika Serikat khawatir dengan ancaman Rudal Balistik.

3. Faktor konteks internasional yaitu Israel terancam karna di tolaknya pemindahan Ibukota dari Tel Aviv ke Yerusalem sebagai ibukota Israel, Iran kembali membuat Nuklir, DK PBB menolak keputusan unilateral AS dan berdampak terhadap negara Jerman yang menjelaskan keputusan Trump membahayakan ekonominya.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk menjelaskan kebijakan luar negeri Amerika Serikat keluar dari perjanjian nuklir JCPOA.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam menulis skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode yang menggambarkan dengan menggunakan fakta – fakta yang memanfaatkan data sekunder yang di peroleh melalui buku – buku, jurnal – jurnal, surat kabar, website dan tulisan – tulisan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini. Sedangkan tehnik pengumpulan data yang di gunakan yaitu melalui penelitian pustaka (*library research*) yang memanfaatkan data–data atau bahan–bahan yang ada di perpustakaan untuk mendukung penelitian yang di peroleh dari buku-buku, majalah, koran, website dan bahan – bahan lain yang sesuai dengan topik yang akan di teliti dan dapat di uji kebenarannya.

G. Jangkauan Penelitian

Pembatasan ruang lingkup penelitian diperlukan untuk mempersempit fokus penelitian sehingga penelitian menjadi lebih terarah dan tidak terlalu meluas pembahasannya. Penulis membatasi penelitian ini dalam konteks hubungan diplomatik khususnya antara Amerika Serikat dibawah kepemimpinan

Donald Trump dan Iran pada tahun 2015-2018. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan penulis menggunakan data rujukan di luar waktu tersebut jika dianggap masih relevan dengan topik penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan bab-bab berikutnya, penulis akan membagikan pembahasan kedalam beberapa bab, dengan perincian sebagai berikut:

BAB I, Berisi Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, metode penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, Penulis menerangkan tentang dinamika politik luar negeri Amerika Serikat serta kebijakan Amerika Serikat terhadap nuklir. Yang meliputi sub bab politik luar negeri Amerika Serikat, Perkembangan dan kepemilikan nuklir Amerika Serikat dan Amerika menentang adanya nuklir.

BAB III, Penulis menerangkan tentang perjanjian nuklir Iran dalam perjanjian Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Mengenai sejarah perkembangan nuklir Iran sampai dengan perundingan yang telah Iran lakukan ketika perundingan Nuklir Amerika Iran berjalan. Status program pengembangan nuklir yang dimiliki oleh Iran sudah dipermasalahkan oleh negara-negara P5+1.

BAB IV, membahas analisa faktor-faktor dari negara Amerika Serikat yang mengambil langkah untuk keluar dari perjanjian dengan negara Iran pada tahun 2018. Pada tanggal 8 Mei 2018, Presiden AS, Donald Trump, menyatakan bahwa AS secara resmi keluar dari kesepakatan *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA).

Bab V, berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya.